

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA LANDUNGSARI
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



Oleh :

ADRIANUS MEMA BAKA DJAWA

NIM 2015210126

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA LANDUNGSARI
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

RINGKASAN

Sifat utama dari research ini ialah deskriptif, Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur pembangunan dan Masyarakat desa sebagai informan utama sekaligus data primer dari penelitian ini ialah data sekunder, yaitu bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan investigasi lain tentang hal ini triangulasi dan kualitatif dipilih oleh peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian didasarkan pada pada prinsip cukup dan sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat antusias dimana budaya gotong-royongnya sangat tinggi baik dalam kegiatan apapun seperti diantaranya dengan menghadiri musyawarah desa.

Saat ini keikutsertaan publik untuk membangun desa sangat baik dalam kerja sama dengan tim bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa masyarakat selalu ikut serta pada aktivitas membangun desa desa tersebut, dan masyarakat juga terjun langsung dalam proses bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Strategi, Partisipasi, dan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Partisipasi ialah diantara instrumen dalam pelaksanaan pembangunan di desa agar tujuan dari pembangunan dapat terwujud dengan baik serta bagian yang integral dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kepentingan daerah mengandung arti bahwa kehidupan manusia seutuhnya, kepentingan penanaman modal daerah semakin menuntut pengenalan akan kebebasan dan komitmen penduduk. Kerjasama ialah kontribusi daerah yang berfungsi, juga dapat diartikan sebagai asosiasi daerah selama waktu yang dihabiskan untuk menentukan arah, sistem strategi perbaikan yang dijalankan oleh otoritas publik.

Peningkatan ialah proses kemajuan yang dibantu melalui upaya sadar dan terencana. Mengingat Perda No. 66 Tahun 2007 tentang Penataan Kota, Perbaikan Kota ialah model partisipatif yang ialah kerangka kemajuan yang bersama-sama yang disertai pertimbangan daerah, kesepakatan, dan kerjasama bersama yang ialah gaya hidup daerah setempat yang telah mapan dalam budaya dan di daerah Indonesia. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 5 Pendeta Dalam Negeri Terbitan No. 66 Tahun 2007, sifat-sifat kemajuan partisipatif meliputi penguatan yang tertata dan partisipatif. Penguatan, ialah upaya memahami kapasitas dan otonomi daerah dalam eksistensi masyarakat, negara dan negara, partisipatif yaitu kekean daerah dan kontribusi dinamis dalam siklus perbaikan. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, dikatakan bahwa kota yang selanjutnya disebut Kelurahan ialah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Peningkatan ialah suatu kemajuan dari upaya untuk memahami perkembangan dan perubahan yang tertata dan sadar yang dianut oleh suatu negara negara menuju inovasi dalam

kaitannya dengan pengembangan negara. Pengertian di atas menunjukkan bahwa usaha perbaikan dan latihan ialah upaya umum. "Pentingnya pemilahan latihan kemajuan bukan hanya kewajiban dan kewajiban otoritas publik dengan semua otoritas dan stafnya tetap setiap individu semua terkait (Siagian Sondang, 2014: 4-5). Dalam memajukan daerah dukungan semua lapisan daerah sebagai pelaku PEMBangunan dan otoritas publik sebagai pembela, bukaan, dan bantalan sangat mendasar. Kelompok masyarakat dan otoritas publik harus berjalan beriringan, saling melengkapi tanpa henti dalam solidaritas pembangunan perbaikan untuk mencapai tujuan yang wajar.

Menurut Mardikanto (2009) Perbaikan ialah suatu karya yang dibuat dengan sengaja dan disusun terus-menerus secara konsisten oleh otoritas publik bersama setiap individu atau dilaksanakan oleh daerah yang bekerja sama dengan otoritas publik, dengan memanfaatkan inovasi yang dipilih, untuk mengatasi semua masalah atau masalah pengiriman. Apa yang sedang dihadapi, untuk kepuasan pribadi atau bantuan pemerintah dari semua penduduk suatu negara yang merencanakan dan melaksanakan tujuan ini. Perbaikan sering dikaitkan dengan ekonomi, masalah pemerintahan, sikap, dan berbagai bidang. Peningkatan juga sering disertai dengan pergeseran ke arah yang lebih baik atau perubahan dari hal-hal lama ke hal-hal baru. Secara sederhana, arti perbaikan ialah setiap gerakan yang tersusun untuk mencapai perbaikan.

Gagasan perbaikan ialah gagasan tentang kemajuan perbaikan dan konsekuensi dari pergantian peristiwa suatu bangsa. Ide perbaikan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga negara atau pemerintah dapat menawarkan jenis bantuan kepada daerah setempat. Seperti yang diutarakan Imam Nazeni, ide perbaikan tersebut dibandingkan dengan siklus PC yang seharusnya memiliki gadget, khususnya:

1. Peralatan; Peralatan yang dikembangkan terdiri dari pekerjaan, cadangan, bahan, basis bisnis dan waktu.

2. Pemrograman; Pemrograman yang dikembangkan meliputi ilmu pengetahuan, penguasaan, pedoman, inovasi, data dan etika.

Istilah perbaikan dalam banyak kasus digunakan dalam kaitannya dengan pengaturan perbaikan, sebuah siklus yang diselesaikan tanpa henti yang mencakup pilihan atau keputusan aset yang ada dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di kemudian hari (conyers and slopes,

1994. Untuk setting Indonesia, pengertian konvensional tentang kesepakatan bersama ialah interaksi untuk memutuskan langkah-langkah masa depan yang tepat, melalui sukseksi keputusan, dengan memperhitungkan aset-aset yang dapat diakses (Peraturan No.25 Tahun 2004 tentang Kerangka Penataan Perbaikan Publik). Dalam menata sebagian besar ada hal-hal pokok yang menjadi komponen-komponen dalam menata. Adapun komponen-komponen dalam menyusunnya ialah sebagai berikut: (Bratakusuma, 2003).

- a) Ada praduga dalam terang realitas. Menyiratkan bahwa pengaturan harus didasarkan pada kecurigaan yang didukung oleh kenyataan atau bukti saat ini.
- b) Adanya Keputusan atau Pilihan Pilihan sebagai alasan untuk memutuskan latihan yang akan diselesaikan. Ini berarti bahwa dalam mempersiapkan pengaturan, penting untuk fokus pada pilihan atau keputusan lain yang berbeda sesuai dengan latihan yang akan dilakukan.
- c. Ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk situasi ini mengatur ialah perangkat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan latihan.

d) Peramalan sebagai tahapan untuk mengikuti potensi hasil yang dapat merugikan pelaksanaan penyusunan.

e) Adanya strategi karena pilihan yang harus dilakukan.

Upaya pemerintah Desa Landungsari untuk mewujudkan pembangunan di desa maka pemerintah desa benar-benar harus bisa mendorong masyarakatnya untuk ikut terlibat atau partisipasi secara aktif dalam berbagai proses pembangunan yang ada di Desa Landungsari sehingga pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik.

Desa Landungsari dijadikan lokasi penelitian karena berdasarkan observasi kami tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dan itu semua tidak terlepas dari berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam manunggalnya kehidupan bersama dengan masyarakat. Segenap masyarakat menyadari, jika pembangunan di desa dapat berhasil, maka pembangunan Nasional akan berhasil. Maka dari itu desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dipilih menjadi tempat penelitian yang akan kami lakukan.

Dengan melatar belakangi diatas sehingga riset mau mengambil judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa”

1.2 Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi pemaparan diatas sehingga timbulah perumusan permasalahan ialah

1. Bagaimana keikutsertaan Masyarakat Desa Landungsari Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa
2. Apa yang menjadi Faktor yang mendukung Dan Faktor yang menghambat Dan pendukung Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan tersebut lalu timbul tujuan untuk merit berikut ialah:

1. Untuk keikutsertaan Masyarakat Desa Landungsari Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa
2. Untuk mengetahui Faktor yang mendukung Dan Faktor yang menghambat Dan pendukung Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Pembangunan Desa

Manfaat Penelitian

a. harapannya riset berikut bermanfaat;

1. riset berikut peneliti bisa mengaplikasikan teori-teori dan memberikan sumbangan pemikiran bagi yang mengembangkan ilmu pengetahuan terutama tentang cara Pemerintah Desa Landungsari pada pembangunan di desa
2. sebagai pengembang intelektual sebagai pengembangan yang sudah didapat saat belajar, dan memberikan tambahan informasi bagi pembaca dalam mengetahui strategi Pemerintah Desa Landungsari dalam mendorong Partisipasi untuk mewujudkan pembangunan.

b. Manfaat Praktis

1. sumbangsih pemikiran untuk pihak-pihak berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan desa
2. Sebagian informasi untuk yang mau melaksanakan hasil peneliti ini sebagai bahan perbandinga

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2013. *Pembangunan pedesaan: pendekatan partisipatif tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Arianto. 2015. “*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*”. Skripsi. FISIP, Ilmu Administrasi, Universitas Halu Oleo Kendari.
- Dwiningrum, 2011. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Effendi, Akbar .2014. *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Salingkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan,
- Faisal nur, 2009. *Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa: program alokasi dana desa di desa bialo kabupaten bulukumbu*. Jurnal pasca unhas.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar ekonomika pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Latif adam 2019. *Partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan infrastruktur di desa Timoreng panua kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rappang.*”

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mustanir, A., Ali, A., & Yasin, A. (2018a). *Transect on Participatory Development*

Planning in Sidenreng Rappang Regency. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Mustanir, A., Abadi, P., & Nasri, A. (2016). *Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. In International Conference on Ethics in Governance. Makassar: Atlantis Press*.

Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). *Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. In International Conference On Democracy, Accountability,*

Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4(2),

225–238.and Governance. Pekanbaru: Atlantis Press.

Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4(2),225–238*.

Kasnawati, Tahir & AT, Ramli. *Pembangunan Masyarakat Kota dan Desa*.

Universitas Terbuka. Tangerang Selatan

Moertopo, Ali. 2001. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Centre For Strategi and International

Mukarom, Zaenal & Laksana, Wijaya. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*.

Bandung: Pustaka SetiaStudies

Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintah*. Malang: UB Press

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surabakti, Irfan. 2002. *Sistem Pendukung Keputusan (Decision Suport System)*.

Yogyakarta: Graha Ilmu

The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta: Liberty

The Liang Gie. 1988. *Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Obor

Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.

YOGYAKARTA: PUSTAKA PELAJAR

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa

Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 2 No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik